**KINERJA BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

***Selvia Junita Praja***

***Institut Pemerintahan Dalam Negeri***

***Selviapraja.sp@gmail.com***

***ABSTRACT***

*This research is aimed to know and analyze the performance of Bappeda* *in preparing annual development plan of South Bengkulu Regency (bottom-up planning) and analyze what factors affect that performance of Bappeda in preparing the annual development planning. To anticipate these obstacles, there needs to be efforts done to increase the performance of Bappeda in the preparation of annual development plan of South Bengkulu Regency.*

*The research was carried out in the Bappeda of South Bengkulu Regency by using descriptive method with qualitative inductive approach. Data and information gathered using interview techniques, documentation, and observation,while the data analysis technique is conducted by triangulation to the existing problems in this research.*

*Based on the results of research can be concluded that the performance of Bappeda in the regional annual development plan is well categorized, suitable with the steps of local development planning, performance appraisal of the Bappeda is conducted by using performance dimensions both individually and organizational, which are: Productivity; Quality of Service; responsiveness; Responsibility; Accountability.*

*The obstacles that faced by Bappeda in implementation of duty in the preparation regional annual development plan are Internal factors are weak organizational structure,lack of human resource, less of facilities and less of operational fund. External factors are relations departments/agencies that are less good and less of society participation.*

***Keywords: Performance, public organizations, Development Planning***

**PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu proses untuk menentukan tindakan masa depan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mekanisme proses perencanaan pembangunan *bottom up planning* di Kabupaten Bengkulu Selatan dibangun melalui kegiatan tahunan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel), musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD), musrenbang Kabupaten/Kota. Munculnya perencanaan pembangunan *bottom up planning* diharapkan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Namun mekanisme perencanaan tersebut dalam implementasinya dinilai kurang aspiratif. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dirasakan sebagai hal yang semu belaka karena lebih banyak diwarnai dialog antar aparat yang diputuskan secara *top down*.

Rencana pembangunan disesuaikan dengan angka-angka sasaran daerah, akan tetapi sering dikutip begitu saja tanpa menyadari kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan daerah sering pula hanya merepresentasikan rencana sektoral dari instansi vertikal. Sehingga perencanaan pembangunan yang secara ideal diharapkan untuk dapat mewujudkan ciri khas daerah (keberanekaan kebutuhan dan potensi) tidak terwujud.

Perencanaan pembangunan ini tidak peka terhadap variasi daerah (mengesampingkan kenyataan akan heterogenitas kondisi dan tuntutan aspirasi daerah) sehingga solusi yang ditawarkan tidak mampu menjawab permasalahan daerah. Pada sisi lain mekanisme ini melemahkan kemampuan kreatif rakyat yang berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan. Kondisi yang demikian bisa memunculkan sikap apatis (ketidakperdulian masyarakat pada pembangunan karena merasa bahwa proses pembangunan tidak menyentuh kebutuhan riil mereka) dan inersia (masyarakat menjadi kurang dapat mengembangkan potensi yang terpendam sehingga cenderung pasif menunggu perintah, dan tergantung pada bantuan) dalam masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah boleh memiliki *planning* dan strategi yang baik, tetapi strategi tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa orang-orang yang tepat untuk melaksanakannya, sebaliknya jika pemerintah memiliki strategi yang kurang baik tapi memiliki orang-orang yang tepat, mereka akan menyempurnakan, dan melaksanakannya secara benar.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bidang perencana menjadi salah satu keharusan yang tidak bisa dikesampingkan. Hal ini penting, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi investasi yang potensial, dikarenakan secanggih apapun teknologi yang dipergunakan, dan sebagus apapun harapan yang diharapkan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh Sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu menjadi motor penggerak bagi terciptanya perencanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah pegawai dalam suatu instansi daerah.

Klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 5 orang dengan proporsi sebesar 8,06 persen. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 34 pegawai dengan persentase sebesar 54,83 persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 10 orang dengan jumlah persentase 16,12 persen sedangkan untuk strata SLTA/SMK berjumlah 13 pegawai dengan menyumbang sebesar 20,96 persen.[[1]](#footnote-1)

 Data jumlah tingkat pendidikan pegawai relatif tinggi tetapi pemahaman mereka tentang tupoksi masing–masing rendah, ini sekaligus akan berdampak pada pencapaian hasil yang mereka lakukan juga rendah serta dapat disimpulkan kinerja mereka secara keseluruhan dinilai rendah. Lebih parah lagi, mereka tidak dapat mendeteksi atau mengidentifikasi apa penyebab kinerja rendah itu, sehingga mereka kesulitan dalam memperbaikinya.

Keberadaan Bappeda sebagai *leading sector* perencana pembangunan di daerah, maka membutuhkan anggaran untuk mewujudkan rencana pemerintah daerah. Apabila terjadi kesenjangan antara dana dan rencana yang akan dilakukan maka berdampak pada pembangunan yang akan dilakukan berjalan lambat. Jumlah anggaran belanja Bapppeda memaparkan tentang kondisi keuangan anggaran Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran secara signifikan dari tahun 2012 yakni sebesar 8,41 persen, tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan anggaran dari tahun 2011 sebesar 0,17 persen kemudian mengalami kenaikan kembali dari tahun 2013 pada tahun 2014 yakni 1,56 persen, walaupun pada tahun 2015 terjadi peningkatan anggaran sebesar 5,24 persen.[[2]](#footnote-2) Hal tersebut menunjukkan peningkatan anggaran terjadi secara tidak signifikan melainkan suatu kondisi perubahan nominal anggaran dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kondisi demikian dapat berpengaruh terhadap pengadaan sarana dan prasarana dimana kantor hanya terdiri dari satu bangunan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat sehingga terjadi ketidakstabilan dalam penentuan program-program dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan pola *bottom up planning.* Proses perencanaan pembangunan ini rutin dilaksanakan setiap tahun anggarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirasakan bahwa kinerja dari Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin berat dan kompleks, yang tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Kinerja Bappeda Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

* 1. Rendahnya Kinerja dari aparatur Bappeda dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pola *bottom up planning.*
	2. Masih terbatasnya sumber daya aparatur di Bappeda, baik kualitas dan kapasitas dalam penyusunan perencanaan *bottom up planning*.
	3. Penerapan pola *bottom up planning* dalam menyerap dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat yang dianggap masih belum terwujudkan.
	4. Minimnya kemampuan anggaran serta sarana dan prasarana dalam proses penyusunan perencanaan *bottom up planning* dengan banyaknya rencana kegiatan.

**TINJAUAN PUSTAKA**

 Menurut Wibowo “kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut atau tentang apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya”.[[3]](#footnote-3) Selanjutnya menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo, “kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi kepada ekonomi”. [[4]](#footnote-4)

Menurut Dwiyanto mengatakan bahwa “penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya”. [[5]](#footnote-5)Dwiyanto, menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi :

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan.
2. Kualitas Layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik emplisit maupun inplisit.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada beberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.[[6]](#footnote-6)

Alexander Abe menjelaskan mengenai konsep perencanaan sebagai berikut :

perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan) Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.[[7]](#footnote-7)

Menurut Abe, pengertian perencanaan daerah ada 2 (dua) macam antara lain :

1. Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan (pembangunan) yang merupakan implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan (1) Perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat, dan (2) Perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan di

daerah. Proses penyusunannya, bisa dilakukan melalui *top down* atau *bottom Up*

* + 1. Perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal. Dalam soal ini terjadi dua kemungkinan (1) perencanaan daerah sebagi rumusan murni kepentingan daerah tanpa mengindahkan koridor dari pusat (2) Perencanaan daerah tidak lebih sebagai kesempatan yang diberikan pusat untuk diisi oleh daerah.[[8]](#footnote-8)

**METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif dan analisis data secara induktif. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[[9]](#footnote-9)

*Snowball sampling* dan *purposive Sampling* dimana dalam awal pengambilan sampelnya berjumlah sedikit, kemudian semakin banyak. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informasi dari 6 orang yang akan di wawancarai yang ahli dan paham terhadap Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan teknik menganalisis data dilakukan dengan triangulasi.

**ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah cukup baik, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi ditunjukkan melalui dimensi teori Kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas,

1. **Produktivitas pada Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan secara menyeluruh harus menunjukkan pencapaian hasil kerja yang optimal, terlebih khusus bagi aparat yang merupakan pelaku dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, karena penyelenggaraan pelayanan yang optimal dapat dicerminkan melalui pencapaian kinerja dari birokrasi pemerintah. Sebagai indikator pencapaian kinerja dapat dilihat dari terlaksananya tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan daerah, Pengkoordinasan kegiatan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, Mengkoordinasikan kegiatan pada Sekretariat dan seluruh bidang pada Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan, Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

 Berdasarkan analisa data dan hasil observasi yang dilakukan terhadap Produktivitas BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan hasil yang cukup tinggi sesuai dengan pencapaian program dan kegiatan (LAKIP) Tahun 2015 dengan persentase capaian 70,30% terlaksana.

1. **Kualitas Pelayanan pada Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kualitas Pelayanan merupakan hal yang bersifat essensial bagi organisasi publik yang harus diwujudkan oleh birokrat pemerintah yang berada didalam lembaga pemerintah yang memilikii fungsi menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hall tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa hingga Kabupaten yang melibatkan semua elemen masyarakat, karena dengan demikian pelayanan dapat terwujud yakni berupa pelayanan informasi terkait dengan rencana prioritas yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna tercapainya Pebangunan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

1. **Responsivitas pada Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Bappeda Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan selaku lembaga pemerintah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah serta melayani masyarakat tentu harus memiliki aparat yang mampu merespon harapan masyarakat sekaligus juga cita-cita daerah secara kontekstual, hal ini dapat diwujudkan melalui koordinasi teknis terkait perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayah, merespon dengan cepat kebutuhan dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah, serta melakukan kerjasama baik dengan instansi/lembaga pemerintah terkait maupun masyarakat selaku stakeholder dalam proses pembanguan di Kabupaten Bengkulu Selatan, tentunya dengan esensi terwujudnya pembangunan Bengkulu Selatan menjadi semakin maju dan berkelanjutan.

1. **Responsibilitas pada Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok Bappeda selaku organisasi publik yakni perencanaan pembangunan Daerah Bengkulu Selatan tentunya harus didasarkan ketaatan terhadap regulasi atau ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah mengenaii RPJPD dan RPJMD maupun aturan yang lebih tinggi, hal tersebut merupakan prinsip dan harus dilaksanakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab. Organiasi publik sebagai ranah dalam birokrasi pemerintahan tentu harus berkinerja sesuai dengan aturan atau dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, dengan demikian diharapkan program dan kegiatan sebagai salah satu indikator kinerja instansi pemerintah dapat tercapai dengan optimal.

1. **Akuntabilitas pada Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Setiap apa yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, terlebih lagi dalam penyelanggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada *stakeholders* yaitu pemerintah dan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang jelas dan kongkrit juga sebagai rujukan dari instansi/lembaga pemerintah yang terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena essensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan perencanaan pembangunan daerah fokusnya adalah masyarakat.

1. **Faktor-faktor Penghambat kinerja Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, berupa faktor internal dan faktor eksternal yaitu:**
2. Faktor internal yaitu:

Faktor internal adalah kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh pengaruh dari dalam ruang lingkup kerja Bappeda, yaitu:

1. Struktur organisasi mengalami kekosongan jabatan, disebabkan oleh kompetensi dari aparatur yang ditempatkan tidak sesuai pada bidangnya.
2. Sumber daya aparatur yang rendah, terbatasnya kesempatan dari aparatur dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
3. Sarana dan prasarana kurang memadai, hal ini karena perencanaan dan pemenuhan dari kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum dilakukan secara optimal.
4. Kurangnya dana operasional, terbatasnya anggaran ataupun perencanaan anggaran yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang seharusnya dalam penyelenggaraan tugas perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Faktor eksternal yaitu:

Faktor eksternal adalah kendala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan disebabkan dari luar ruang lingkup kerja Bappeda, yaitu:

1. Sulitnya koordinasi Bappeda dengan Dinas/ Instansi yang lain, hal ini karena komunikasi secara efektif belum mampu dilakukan oleh instansi dengan instansi yang lain, padahal dalam pembangunan daerah instansi/lembaga harus mampu bersinergi guna mewujudkan tujuan pembangunan bersama secara berkelanjutan.
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, karena meski dilibatkan dalam proses perencanaan melalui turut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan namun belum direspon dengan baik oleh masyarakat, ditandai dengan rendahnya minat masyarakat untuk hadir dan memberi sumbangsih aspirasi
3. **Untuk mengatasi Faktor internal dan eksternal pada kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah melakukan berbagai upaya yang diprioritaskan antara lain:**
4. Meningkatkan kedisiplinan aparat Bappeda melalui penertiban apel pagi dengan penerapan budaya malu datang terlambat dengan cara atasan atau pimpinan memberikan teladan datang awal dari bawahan.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan dinas/instansi guna mendapatkan data dan informasi yang berkualitas sebagai masukan untuk pembuatan rencana yang lebih makro dan tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.
6. Adanya pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus terhadap pegawai di Bappeda untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
7. Adanya pengawasan dan monitoring terhadap jalanya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Peningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta sarana dan prasarana lain yang menunjang efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan terhadap masyarakat serta tepat waktu dalam penyelesaian.

**KESIMPULAN**

1. Kinerja Bappeda dalam Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan penerapan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom Up* *Planning*) dengan pengukuran kinerja menggunakan dimensi kinerja yaitu produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas didalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik, diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD, Kabupaten/ Kota meliputi tahapan mekanisme pelaksanaan dari hasil pelaksanaan berupa program-program pembangunan yang akan dilaksanakan serta sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan dengan masyarakat, lembaga pendidikan, maupun kepada lembaga swadaya masyarakat sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan dapat memulihkan kepercayaan mereka terhadap kinerja pemerintah khususnya Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kinerja Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah masih adanya kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dan mempengaruhi gerak operasional Bappeda yaitu:
3. Struktur organisasi mengalami kekosongan jabatan
4. Sumber daya aparatur yang rendah
5. Sarana dan prasarana kurang memadai
6. Kurangnya dana operasional
7. Sulitnya koordinasi Bappeda dengan Dinas/ Instansi yang lain
8. Tingkat partisipasi masyarakat
9. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:
10. Adanya pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus terhadap pegawai di Bappeda untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga dapat dilakukan perbaikan struktur dan mengisi jabatan yang kosong.
11. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia salah satunya yakni kedisiplinan aparat Bappeda melalui penertiban apel pagi dengan penerapan budaya malu datang terlambat dengan cara atasan atau pimpinan memberikan teladan datang awal dari bawahan.
12. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih terbatas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kinerja yang maksimal.
13. Mengoptimalkan anggaran yang dimiliki dalam operasional kegiatan, sehingga dapat memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap jalanya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
14. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan dinas/instansi guna mendapatkan data dan informasi yang berkualitas sebagai masukan untuk pembuatan rencana yang lebih makro dan tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.
15. Peningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta sarana dan prasarana lain yang menunjang efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, sehingga dapat juga menstimulus partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

**SARAN**

1. Pengukuran Kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menggunakan indikator-indikator yang kontekstual seperti misalnya pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, suksesi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat maupun forum pimpinan daerah serta instansi terkait.
2. Berdasarkan faktor penghambat maka tindakan yang dapat dilakukan ialah :
3. Perbaikan sistem organisasi Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat sehingga menjadi lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan dan fungsi perencanaan pembangunan
4. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih kepada staf Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melakukan perencanaan sampai pada pemenuhan kebutuhan mengenai sarana dan prasarana guna mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Perlu penganggaran dana yang sesuai untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar mendukung pelaksanaan tugas.
7. Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk tim sosialisasi yang terdiri dari Bappeda, Dinas-Dinas Daerah dan Instansi Terkait. Tim sosialisasi ini melakukan pertemuan secara berkala dengan masyarakat untuk menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat.
8. Lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring terutama terhadap pelaksanaan Penyusunan perencanaan pembangunan agar tidak lagi mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, serta melakukan stimulus partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Agar mempertimbangkan seluruh upaya-upaya dalam penelitian ini yang dikembangkan dan dapat dilakukakan guna memaksimalkan kinerja Bappeda. Oleh karena itu, tidak hanya melibatkan penulis saja tetapi juga melibatkan pihak yang terkait dalam mengoptimalkan kinerja Bappeda dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui komitmen darii aparat Bappeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.

Amins, Achmad. 2009. *Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gahjah Mada University Press.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.*Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mangkunegara, anwar prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Manullang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta*: Gadjah Mada university Press.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

**SUMBER LAIN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBappeda 2015

Rencana Strategis Bappeda 2011-2015

Bengkulu Selatan Dalam Angka 2015

1. Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wibowo, *Manajemen Kinerja,* Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-4)
5. Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gahjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 47 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid hlm 50 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo, 2002, hlm 25 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm 30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 9 [↑](#footnote-ref-9)